

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Stewardship (*Stewardship Theory*)

Teori Stewardship (*Stewardship Theory*) merupakan suatu teori yang menjelaskan tentang suatu kondisi dimana para manajemen tidak terfokus oleh tujuan-tujuan individu, melainkan lebih berorientasi kepada tujuan sasaran hasil utama mereka yaitu untuk kepentingan suatu instansi/lembaga (Donaldson dan Davis, 1991). Teori ini menganggap bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kesuksesan instansi/lembaga dengan kepuasan pemilik. Upaya untuk memperoleh kesuksesan dalam sebuah instansi/lembaga adalah dengan memaksimalkan utilitas kelompok *principals* dan manajemen sehingga kepentingan individu dalam kelompok organisasi tersebut dapat dimaksimalkan.

Teori *Stewardship* mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan suatu kondisi dimana manajer selaku *steward* akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik selaku *principal*. Apabila dikaitkan dengan pemerintah daerah, maka pemerintah sebagai *steward* atau pelayan dan masyarakat sebagai *principal*. Pemerintah akan berusaha untuk memaksimalkan urusan pemerintahannya sehingga tujuan untuk menyejahterakan masyarakat dapat tercapai. Akuntansi di pemerintah daerah telah dipersiapkan perannya untuk selalu memenuhi kebutuhan organisasi

sektor publik melalui penyajian informasi keuangan berupa laporan keuangan yang bermanfaat sebagai dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

2. Teori COSO

Teori COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) telah menerbitkan *Internal Control – Integrated Framework* pada tahun 1994 dan menyatakan bahwasanya pengendalian intern adalah suatu pengendalian atas kegiatan (operasional) di instansi/lembaga yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan untuk mencapai tujuan instansi/lembaga secara efisien dan efektif, serta meliputi seluruh kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan.

Menurut teori COSO, terdapat 5 (lima) komponen kebijakan dan prosedur yang telah dirancang serta diterapkan guna memberikan kepastian tercapainya tujuan pengendalian intern pada suatu perusahaan secara efektif dan efisien. Berikut adalah lima komponen pengendalian intern menurut teori COSO, antara lain:

a. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian merupakan salah satu komponen pengendalian intern yang sangat penting dan menjadi dasar keefektifan dari komponen-komponen pengendalian intern lainnya. Lingkungan pengendalian berkaitan erat dengan orang, moralitas, integritas, kejujuran, dan kompetensi (Susilawati dan Riana, 2014). Seluruh elemen yang berada di suatu instansi/lembaga diharuskan untuk menciptakan dan memelihara lingkungan sehingga dapat berdampak pada timbulnya perilaku positif dan

mendukung pengendalian intern dan manajemen yang sehat dalam suatu instansi/lembaga tersebut. Contoh lingkungan pengendalian yaitu: pemberian dan pemisahan fungsi wewenang dan tanggung jawab, *job description*, dan kebijakan sumber daya manusia seperti pelatihan dan kompensasi.

b. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Penilaian risiko merupakan suatu komponen pengendalian intern yang bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola berbagai risiko yang dimaksudkan untuk mengatasi risiko-risiko secara efektif dan efisien yang dapat menghambat pencapaian tujuan suatu organisasi. Contoh penilaian risiko yaitu: penggunaan *Key Performance Indicator (KPI)*, survei kepuasan *customer*, dan *Balance Score Card (BSC)*.

c. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*)

Aktivitas pengendalian merupakan salah satu komponen pengendalian intern yang meliputi kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk membantu memberikan keyakinan bahwa semua arahan telah dilaksanakan sesuai dengan arahan pimpinan suatu instansi/lembaga secara efektif dan efisien. Contoh aktivitas pengendalian yaitu: perancangan dan penggunaan dokumen/catatan yang memadai, dilakukannya pengecekan secara independen, dan lain-lain.

d. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communication*)

Informasi dan komunikasi termasuk ke dalam salah satu komponen pengendalian intern yang bertujuan untuk memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan secara cepat dan tepat guna menunjang kegiatan operasional di suatu instansi/lembaga sehingga dapat membantu pimpinan di instansi/lembaga tersebut dalam melaksanakan tanggungjawabnya untuk melakukan pengendalian. Contoh informasi dan komunikasi yaitu: rekonsiliasi, *protect user-ID dan password* dan verifikasi tandatangan atas penarikan cek.

e. Pemantauan (*Monitoring*)

Pemantauan merupakan salah satu komponen pengendalian intern yang bertujuan untuk menilai kualitas dan efektivitas dari sistem pengendalian intern, serta melakukan pembaharuan sistem pengendalian intern apabila diperlukan. Contoh pemantauan yaitu: mengevaluasi atau menindaklanjuti hasil audit dan revidu, penilaian kinerja karyawan dan pengujian efektivitas sistem pengendalian intern (Saleba dan Siti, 2014).

3. **Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Laporan keuangan merupakan catatan yang dimiliki oleh suatu instansi/lembaga yang isinya berupa data maupun informasi keuangan dalam satu periode tertentu akuntansi dan digunakan sebagai alat komunikasi informasi keuangan antara instansi/lembaga tersebut dengan pihak eksternal. Mahmudi (2011:143) mengatakan bahwa laporan keuangan sebagai hasil dari sistem akuntansi yang telah diolah secara terkomputerisasi dan digunakan

untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu, laporan keuangan juga berfungsi sebagai alat akuntabilitas dan evaluasi kinerja khususnya kinerja keuangan. Pemerintah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya sangat berkaitan erat dengan pengambilan keputusan sehingga pelaporan keuangan bagi pemerintah sangat penting demi terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*).

Informasi keuangan pada laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi tujuan pelaporan keuangan pemerintah secara efektif apabila penyajian laporan keuangan tersebut telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu organisasi yang dilaporkan selama satu periode akuntansi.

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa laporan keuangan yang dihasilkan harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan yang meliputi: relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Jika informasi keuangan yang termuat dalam laporan keuangan telah memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah, maka pemerintah tersebut dianggap telah mampu menciptakan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Apabila tidak sesuai dengan perundang-undangan, maka akan mengakibatkan kerugian daerah, potensi kekurangan daerah, kekurangan penerimaan, kelemahan administrasi, ketidakhematan, ketidakefisienan, dan

ketidakefektifan (Ahsani, 2016). Berikut adalah karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010:

a. Relevan

Laporan keuangan dinyatakan relevan apabila informasi keuangan tersebut mempunyai manfaat dan dapat mempengaruhi keputusan manajerial pengguna laporan keuangan dalam membuat suatu keputusan yang berfungsi sebagai bahan evaluasi peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa depan, serta memperbaiki hasil evaluasi yang telah dilakukan di masa lalu. Adapun informasi keuangan yang relevan terkait dengan laporan keuangan yaitu:

- 1) Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), artinya bahwa informasi keuangan dapat digunakan oleh para pengguna untuk mengoreksi atau memperbaiki ekspektasi mereka di masa lalu
- 2) Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), artinya bahwa informasi keuangan berfungsi untuk memprediksi masa yang akan datang dengan berdasar pada peristiwa yang terjadi di masa lalu dan masa sekarang
- 3) Tepat waktu, artinya bahwa informasi keuangan disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan
- 4) Lengkap, artinya bahwa informasi keuangan pada laporan keuangan disajikan secara lengkap dan dijelaskan secara detail sehingga dapat meminimalisirkan terjadinya kekeliruan dalam penggunaan informasi keuangan.

b. Andal

Laporan keuangan dikatakan andal apabila informasi keuangan yang disajikan telah bebas dari pengertian yang menyesatkan, disajikan secara jujur sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak mengandung unsur bias dalam penyajian laporan keuangan, dan dapat diverifikasi (*verifiability*).

c. Dapat dibandingkan

Informasi keuangan pada laporan keuangan dapat dikatakan lebih bermanfaat apabila laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami

Informasi keuangan pada suatu laporan keuangan juga dapat dinyatakan bermanfaat apabila informasi keuangan tersebut dapat dipahami oleh para pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman pengguna laporan keuangan. Oleh karena itu, pengguna laporan keuangan diasumsikan mempunyai pengetahuan yang memadai atas kegiatan operasional di suatu entitas sehingga dapat memahami informasi keuangan tersebut secara tepat.

4. Sistem Pengendalian Interen

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Interen Pemerintah, “sistem pengendalian interen yaitu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 3 ayat 1, telah dijelaskan bahwasanya unsur-unsur dari sistem pengendalian interen terdiri dari:

- a. Lingkungan pengendalian
- b. Penilaian risiko
- c. Aktivitas pengendalian
- d. Informasi dan komunikasi
- e. Pemantauan

Sistem pengendalian interen dipengaruhi secara langsung oleh sumber daya manusia yang didesain untuk membantu mengarahkan dan mengukur sumber daya instansi/lembaga tersebut untuk mencapai suatu tujuan tertentu di instansi/lembaga. Sistem pengendalian interen dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah digunakan sebagai alat monitor kegiatan keuangan sehingga dapat mencegah terjadinya kecurangan dan memberikan jaminan dilaksanakannya strategi yang telah direncanakan secara efektif dan

efisien. Sistem pengendalian interen diharapkan dapat meminimalisir risiko dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Harnoni, 2016).

5. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan pada Keputusan Kepala BKN No. 46A Tahun 2007, kompetensi didefinisikan sebagai suatu kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skill*), dan sikap (*attitude*) yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan jabatannya, sehingga tugas tersebut dapat dilaksanakan secara profesional, efektif, dan efisien. Sedangkan definisi sumber daya manusia menurut Yosefrinaldi (2013) adalah salah satu elemen yang berperan sangat penting karena memiliki kontribusi optimal dalam suatu instansi/lembaga di segala bidang pekerjaan sehingga perlu ditingkatkan kemampuan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan dilakukan sebaik mungkin agar tujuan suatu instansi/lembaga dapat dicapai secara efektif dan efisien.

Sumber daya manusia yang berkompeten akan memberikan manfaat terhadap pembuatan laporan keuangan, salah satunya ialah dapat menghemat waktu dan tenaga. Hal tersebut dikarenakan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki sumber daya manusia memberikan dampak pada penyajian laporan keuangan sehingga laporan keuangan tersebut dapat diselesaikan tepat pada waktunya (Kiranayanti, 2016). Semakin cepat dilakukannya penyajian laporan

keuangan maka akan semakin baik dalam hal pengambilan keputusan (Wati dkk., 2014).

Upaya mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang baik dapat dilakukan dengan cara memiliki sumber daya manusia yang berkompeten sehingga pekerjaan yang dihasilkan akan menjadi berkualitas. Hal yang dapat dilakukan guna mendukung kompetensi sumber daya manusia yaitu dengan memiliki sumber daya manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, sering mengikuti pelatihan atau seminar, dan mempunyai pengalaman di bidang keuangan. Dengan demikian, hal tersebut tentunya akan membawa dampak baik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Kegagalan sumber daya manusia akan mengakibatkan terjadinya kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan adanya ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008).

Menurut Hutapea dan Thoha (2008:8) terdapat tiga aspek utama pembentukan kompetensi sumber daya manusia, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap.

a. Pengetahuan (*knowledge*)

Pengetahuan (*knowledge*) adalah informasi yang dimiliki seorang pegawai untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai bidang yang digelutinya (tentunya) sehingga ilmu/informasi tersebut dapat digunakan dalam kondisi nyata di suatu pekerjaan. Pengetahuan seorang pegawai dapat berasal dari pendidikan formal maupun pendidikan nonformal. Pendidikan nonformal meliputi mengikuti pelatihan atau

workshop, kursus, magang dan seminar. Sedangkan pendidikan formal meliputi studi S1, S2, ataupun S3. Pengetahuan seorang pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya, pegawai yang mempunyai pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi instansi/lembaga. Namun bagi pegawai yang belum mempunyai pengetahuan cukup, maka dalam melaksanakan pekerjaannya akan tersendat-sendat.

b. Keterampilan (*skill*)

Keterampilan (*skill*) merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh instansi/lembaga untuk meningkatkan keterampilan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan sehingga diperoleh hasil pekerjaan yang baik dan maksimal. Misalnya yaitu keterampilan bekerja sama dengan memahami dan memotivasi orang lain, baik secara individu atau kelompok. Keterampilan ini sangat diperlukan bagi pegawai yang sudah menduduki jabatan tertentu karena sangat berpengaruh dalam berkomunikasi, memotivasi, dan mendelegasi. Berkaitan dengan hal tersebut, instansi/lembaga akan merekrut pegawai sesuai dengan bidang yang dibutuhkan agar nantinya pegawai memiliki keterampilan yang cocok dibidangnya.

c. Sikap (*Attitude*)

Sikap (*Attitude*) merupakan pembentukan karakter seseorang yang terdapat didalam diri masing-masing individu. Sikap seseorang dibentuk pertama kali di lingkungan interen yaitu keluarga, yang mana melalui

keluarga tersebut seseorang akan mendapatkan arahan dan pengajaran sehingga terbentuklah karakter mereka. Sikap sebagai pola tingkah laku seorang pegawai didalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan peraturan instansi/lembaga. Apabila pegawai mempunyai sifat mendukung pencapaian tujuan instansi/lembaga, maka secara otomatis segala tugas yang dibebankan kepadanya akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Namun apabila seorang pegawai mempunyai sifat yang bertolak belakang dengan pencapaian tujuan instansi/lembaga, maka akan sulit bagi pegawai tersebut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan kerjanya.

6. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Teknologi informasi menurut Triyanto (2017) merupakan teknologi yang digunakan seseorang untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya di instansi/lembaga dengan cepat, tepat, dan rapi, seperti dalam hal pembuatan laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi dapat memberikan dampak yang baik bagi instansi/lembaga karena selain laporan keuangan dapat disajikan secara tepat waktu, juga informasi yang disampaikan menjadi lebih akurat sehingga sangat membantu para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan. Pemanfaatan teknologi informasi lainnya yaitu memiliki kecepatan akses dalam memproses suatu informasi dan menyajikan laporan keuangan yang didukung oleh keahlian personil dalam mengoperasikannya sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Pemanfaatan teknologi informasi di instansi/lembaga, khususnya pemerintahan, akan sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan kecepatan pelayanan. Apabila pemerintah dalam urusan pemerintahannya memberikan pelayanan yang cepat, maka tidak menutup kemungkinan akan timbul kepuasan pelanggan. Semakin banyak pelanggan yang merasa puas atas pelayanan yang diberikan, maka kinerja pemerintah dalam hal memberikan pelayanan akan dinilai sangat baik.

Teknologi informasi dapat digunakan untuk menginput, mengolah/memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data secara cepat dan akurat sehingga informasi keuangan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Teknologi informasi selain berfungsi sebagai teknologi komputer (*hardware* dan *software*), juga berguna dalam hal penyebaran informasi dengan menggunakan jaringan yang menghubungkan antarunit. Teknologi informasi meliputi komputer, jaringan, *software* (perangkat lunak), *database*, *electronic commerce*, dan jenis lainnya. Komputer merupakan salah satu komponen dari teknologi informasi yang dimiliki manusia dan komputer juga dapat mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Wilkinson *et al.*, 2000).

Teknologi informasi yang baik yaitu teknologi informasi yang juga mengelola *voice mail*, *electronic mail*, *groupware system* yang memungkinkan pegawai melakukan komunikasi dan membagi informasi antara satu sama lain dalam suatu jaringan tertentu. Mengelola teknologi informasi berarti juga mengelola jaringan *supplier* dan *customers* baik dalam jaringan melalui

internet maupun jaringan intranet (Indriasari dan Ertambang, 2007). Jaringan internet merupakan suatu jaringan komputer yang menghubungkan antarunit komputer untuk keperluan komunikasi dan informasi.

B. Penurunan Hipotesis dan Hasil Penelitian Terdahulu

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Interen Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Kiranayanti (2016), suatu sistem yang berkualitas, didesain dan dibangun serta dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian dalam sistem tersebut terintegrasi dengan baik sehingga dapat beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Salah satu bagian dari sistem informasi akuntansi yang dimaksud adalah sistem pengendalian interen (*internal control system*). Menurut teori COSO, sistem pengendalian interen berfungsi untuk mencapai tujuan suatu instansi/lembaga secara efektif melalui kebijakan-kebijakan maupun prosedur-prosedur yang telah diterapkan pada suatu instansi/lembaga. Terciptanya sistem pengendalian interen yang berkualitas dapat meminimalisir risiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan dan dapat mendeteksi jika terjadi kecurangan dalam pembuatan laporan keuangan sehingga nantinya akan berpengaruh pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penyimpangan dan kebocoran yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporan keuangan menunjukkan bahwasanya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum memenuhi karakteristik

kualitatif laporan keuangan yang disyaratkan. Hasil audit BPK terhadap opini LKPD yaitu “Tidak Wajar dan/atau *Disclaimer*” disebabkan oleh lemahnya sistem pengendalian intern yang diterapkan oleh pemerintah daerah terkait (IHPS BPK Semester I Tahun 2005).

Penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yosefrinaldi (2013), Permatasari (2017), Ahsani (2016), dan Yeni (2016) yang membuktikan secara empiris bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Kiranayanti (2016) juga mengatakan hal yang sama bahwasanya sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H₁: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber daya manusia menurut Kiranayanti (2016) adalah individu atau sekelompok orang dalam suatu instansi/lembaga yang memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan tugasnya. Sumber daya manusia yang berkompeten sangat diperlukan oleh suatu instansi/lembaga, khususnya di bidang akuntansi, karena sumber daya manusia tersebut memahami logika

akuntansi dengan baik sehingga akan berpengaruh pada kualitas dalam penyusunan laporan keuangan. Hal ini disebabkan sumber daya manusia memiliki pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan untuk dikembangkan sesuai dengan bidang yang ditekuninya.

Soimah (2014) berpendapat bahwa sumber daya manusia yang mengalami kegagalan dalam memahami dan menerapkan ilmu pengetahuannya di bidang akuntansi akan menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan fungsi akuntansi. Hal ini akan memicu terjadinya kekeliruan pada laporan keuangan yang telah dibuat sesuai dengan SAP, sehingga kualitas laporan keuangannya menjadi buruk. Apabila kualitas laporan keuangannya buruk, maka tingkat kredibilitas laporan keuangan menjadi turun karena informasi keuangan yang disajikan tidak handal.

Penelitian yang dilakukan oleh Roviyantje (2011) telah membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian Roviyantje (2011) sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurillah (2014), Kiranayanti (2016), Putri (2016), dan Evicahyani (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa semakin sumber daya manusia berkompeten, maka semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dan hal tersebut akan berdampak pada meningkatnya kualitas laporan

keuangan di pemerintah daerah tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka hipotesis kedua yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

H₂: Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

3. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, telah dijelaskan bahwasanya untuk menciptakan proses pembangunan yang optimal agar sejalan dengan prinsip tata kelola yang baik (*Good Governance*), maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah wajib untuk memanfaatkan dan mengembangkan kemajuan teknologi informasi guna meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah sebagai salah satu bentuk pelayanan terhadap publik.

Pemanfaatan teknologi informasi secara maksimal dapat memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan membangun jaringan sistem informasi manajemen dan menyederhanakan akses antar unit kerja (Nurillah, 2014). Manfaat lain dari penggunaan teknologi informasi ialah dapat memudahkan proses pengelolaan data transaksi keuangan sehingga penyajian laporan keuangan dapat dilakukan secara cepat dan tepat waktu, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan pembuatan laporan keuangan yang utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan

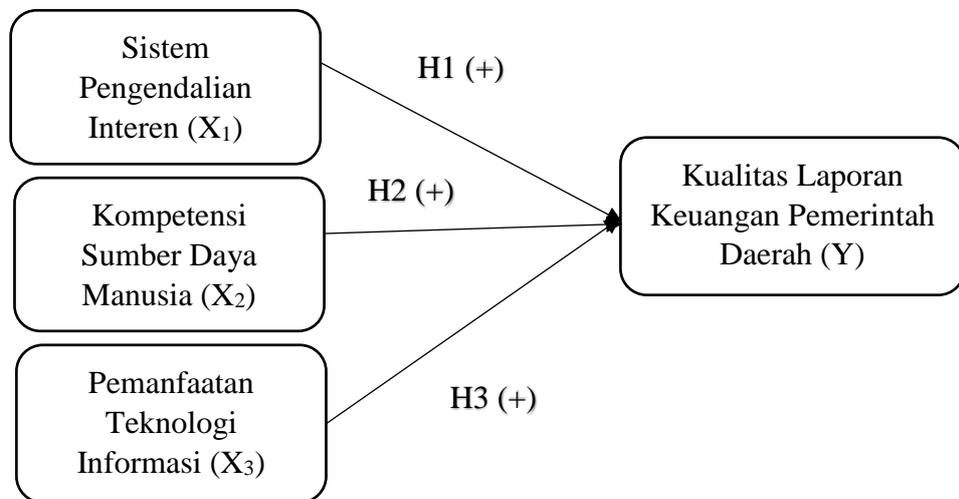
keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut dapat membuat laporan keuangan menjadi lebih akurat dan tepat.

Penelitian mengenai pemanfaatan teknologi informasi telah dilakukan oleh Nurillah (2014) dan hasil penelitiannya adalah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2014), Permatasari (2107), Triyanto (2017), dan Yuliani (2016) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis ketiga yang dapat dirumuskan ialah sebagai berikut:

H₃: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

C. Model Penelitian

Berdasarkan uraian rerangka teori yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik suatu kerangka konseptual yang berfungsi untuk memudahkan jalannya pemikiran terhadap permasalahan yang dibahas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh hubungan antara variabel independen yaitu sistem pengendalian interen, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi dengan variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Berikut adalah kerangka konseptual yang digambarkan sesuai dengan model penelitian ini:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual Penelitian